

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Rabu tanggal 20 November 2002 menjadi hari yang sibuk bagi Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Selain mengurus kasus *sweeping* terhadap warga negara Indonesia di Australia, Hassan juga harus memberi penjelasan terkait sidang sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan yang masing-masing menggantung di ICJ. Semua permasalahan yang sedang terjadi harus dijelaskan Hassan di muka sidang Komisi I DPR RI.¹

Setelah berakhirnya pertemuan dengan DPR, Hassan membawa pulang banyak amanat yang mesti dikerjakan. Terkait kasus Pulau Sipadan-Ligitan misalnya, Hassan diminta menyosialisasikan duduk perkara sengketa Pulau Sipadan-Ligitan kepada publik. Selain sosialisasi kepada lembaga atau badan pemerintah, sosialisasi juga harus dilakukan dengan mendatangi kantor media massa. Harapannya, para editor media massa bisa ikut membantu memberi penjelasan kepada masyarakat sehingga tidak timbul kegaduhan.²

Sebagaimana diketahui, sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung sejak 27 tahun sebelumnya.³ Jauh sebelum Hassan Wirajuda menjabat sebagai menteri luar negeri. Setelah melalui serangkaian proses negosiasi, pada tahun 1997 pemerintahan Indonesia dan Malaysia menandatangani *Special Agreement* yang menyepakati kasus sengketa diselesaikan melalui ICJ. Selanjutnya pada 2 November 1998, kesepakatan tersebut secara resmi diajukan ke ICJ yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.

¹ Harian Kompas, edisi tanggal 21 November 2002, halaman 2.

² Ibid, halaman 2

³ Berita Harian, edisi tanggal 17 Desember 2002, halaman 8.

Periodesasi kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan diulas kembali media New Strait Times, menjelang pembacaan keputusan hakim ICJ.⁴

Dari segi pemberitaan media massa, hubungan dua negara yang saling bertetangga, Indonesia dan Malaysia memang selalu menarik untuk dibahas. Daya tarik tersebut muncul karena kedua negara kerap berseteru dengan berbagai persoalan. Mulai dari persoalan sengketa wilayah, tenaga kerja, budaya, hingga terorisme. Berbagai persoalan sengketa itu telah mengundang perhatian media massa. Dengan gamblang, media massa selalu menjadikan topik tentang sengketa Indonesia – Malaysia sebagai pokok pembahasan.

Di antara sekian banyak sengketa tersebut, persoalan tentang batas wilayah seringkali ditampilkan media massa. Batas wilayah itu tidak hanya meliputi wilayah perairan laut, tapi juga meliputi wilayah daratan. Dari batas-batas wilayah itu pulalah nantinya ditentukan aset masing-masing negara. Karena proses penentuan tersebut tidak mudah, maka persoalan seringkali muncul berlarut-larut. Wilayah perbatasan yang lebih sulit dikendalikan adalah wilayah perbatasan berupa lautan.⁵ Perundingan batas wilayah itu tidak bisa cepat penyelesaiannya seperti orang membeli kacang, tapi membutuhkan waktu yang lama.⁶

Sengketa tentang kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan adalah salah satu tema menarik yang paling banyak ditampilkan di media massa. Kasus tersebut bermula dari persoalan wilayah perbatasan yang kemudian berimplikasi pada penentuan kepemilikan aset maritim berupa dua pulau yakni Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

⁴ New Strait Times, edisi tanggal 16 Desember 2002, halaman 4

⁵ Bambang Cipto, *Malaysia Makin Nakal?* (Harian Kedaulatan Rakyat -rubrik Analisis) edisi 18 Agustus 2010.

⁶ Hassan Wirajuda, *Sipadan – Ligitan bukan milik Dua Negara* (kompas.com), 26 Juni 2009.

Batas maritim antara Indonesia dan Malaysia termasuk salah satu yang paling tinggi tingkat permasalahannya, setidaknya jika dilihat dari kasus dan sengketa yang diberitakan media massa. Permasalahan muncul ketika Malaysia menerbitkan 2 lembar peta wilayahnya pada tanggal 21 Desember 1979 yang mencakup wilayah maritim yang belum disepakati. Pulau Sipadan dan Ligitan termasuk di dalamnya sehingga memicu protes tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara lainnya di Asia Tenggara.⁷

Secara geografis, Pulau Sipadan dengan luas 10,4 ha terletak 15 mil laut (sekitar 24 km) dari pantai Sabah (Malaysia) dan 40 mil laut (sekitar 64 km) dari pantai Pulau Sebatik (Indonesia). Sementara Pulau Ligitan dengan luas 7,9 ha terletak sekitar 21 mil laut (sekitar 34 km) dari pantai Sabah (Malaysia) dan 57,6 mil laut (sekitar 93 km) dari pantai Pulau Sebatik.

Media massa yang menurunkan pemberitaan tentang sengketa Sipadan-Ligitan ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia. Masing-masing media memiliki corak dan pandangan tersendiri dalam menurunkan sebuah pemberitaan. Kondisi demikian, terpengaruh juga oleh sistem perpolitikan yang dianut di masing-masing negara. Di Indonesia sendiri, kebebasan pemberitaan baru muncul setelah reformasi digulirkan akhir Mei 1998.⁸

Dari tulisan-tulisan yang muncul di media massa bisa diketahui, jika persoalan batas wilayah menjadi topik yang menarik untuk diulas. Efek yang ditimbulkan cenderung menjurus ke arah politik. Dalam hal ini presiden yang sedang berkuasa sering menjadi sasaran pemberitaan maupun opini masyarakat. Media massa memberi porsi terhadap topik-topik yang menyangkut

⁷ I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), hal 142.

⁸ Henry Subiakto dan Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media & Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 76.

hubungan Indonesia – Malaysia tersebut. Tulisan biasanya dijadikan topik utama (*headline*) di halaman satu maupun di halaman dalam atau halaman rubrikasi.

Respon yang kuat dari media massa bahkan cenderung memposisikan media tersebut pada salah satu kubu. Seperti berita yang diterbitkan Harian Padang Ekspres berjudul : “Malaysia Arogan”.⁹ Kata-kata arogan sengaja dipilih redaksi untuk merespon sikap pemerintah Malaysia yang ketika itu menolak kedatangan pengacara, Adnan Buyung Nasution yang hendak menghadiri seminar yang diadakan kelompok oposisi Anwar Ibrahim.

Sementara situs berita online, *tempo.co.id* salah satunya menyajikan topik, tentang pertemuan Kementerian Luar Negeri dengan Komisi DPR RI yang membidangi masalah Pertahanan, Keamanan dan Luar Negeri. Pemberitaan dalam situs ini cenderung kritis terhadap pemerintah Indonesia, dengan menyoal sikap pemerintah yang terkesan pasrah menunggu putusan Mahkamah Internasional. Disebutkan juga dalam berita tersebut, pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang Sipadan-Ligitan sesuai anjuran DPR RI.¹⁰

Tidak hanya di Indonesia, topik tentang Sipadan-Ligitan juga disajikan media massa yang ada di Malaysia. Seperti pemberitaan yang dimuat situs *utusan.com*, menyatakan terang-terangan bahwa Pulau Sipadan-Ligitan adalah milik pemerintah Malaysia. Dalam pemberitaannya dikemukakan dalil bahwa Sipadan-Ligitan sebagai warisan dari penjajahan Inggris yang wilayahnya dulu meliputi wilayah yang dinamakan British Borneo Utara.¹¹

Situs berita online lainnya yang juga berasal dari Malaysia adalah situs : *beritasemasa.com*, mempersoalkan pemberitaan media Indonesia yang terlalu berlebihan soal

⁹ Harian Padang Ekspres, 12 Oktober 2002, hal. 1.

¹⁰ Situs berita online: *tempo.co.id* diposting tanggal 20 November 2002.

¹¹ Situs berita online: *utusan.com* diposting tanggal 7 Juni 2002.

Sipadan-Ligitan. Media yang notabene sebagai oposisi pemerintah Malaysia ini mengingatkan Indonesia untuk tidak membesarkan persoalan Sipadan-Ligitan. Menurut *beritasemasa.com*, pemerintah Indonesia harus bersyukur karena mendapatkan Natuna. Pemberitaan dari *beritasemasa.com* tersebut, merupakan respon, karena setelah kasus Sipadan-Ligitan muncul, timbul lagi gejolak tentang kepemilikan wilayah Tanjung Datu dan Gosong Niger. Situs berita ini bahkan mengklaim sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan merupakan bagian wilayah Malaysia, karena dulunya wilayah di Kalimantan tidak sepenuhnya di bawah pemerintahan Belanda.

Demikianlah pemberitaan sejumlah media massa dalam menyajikan berita tentang Sipadan-Ligitan. Pemberitaan tersebut mengemuka sebelum hingga sesudah keputusan resmi oleh Mahkamah Internasional yang menyatakan pemerintah Malaysia sebagai pemenang Sipadan-Ligitan. Pada hari putusan itu dikeluarkan, boleh dikatakan semua media massa menyajikan informasi tersebut dalam pemberitaan utama. Tidak hanya koran nasional, tapi juga dimuat oleh koran-koran lokal yang basisnya per daerah.

Berdasar uraian permasalahan tersebut maka penulis mencoba membahas tentang :
Pemberitaan Media Massa Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan – Ligitan 1998 – 2002

II. Batasan dan Rumusan Masalah

Tesis ini akan mengkaji pemberitaan media massa (pers) yang ada di Indonesia dan Malaysia terkait sengketa kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan. Media massa yang dijadikan rujukan adalah media massa nasional yang melaksanakan aktivitas penerbitan saat sengketa berlangsung, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana media massa memberitakan sengketa kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan?
2. Apa saja media massa yang ikut memberitakan tentang Sipadan-Ligitan?
3. Apa kebijakan pemerintah yang dipublikasikan media massa?

Untuk di Indonesia media massa yang digunakan adalah Harian Kompas dan Harian Media Indonesia. Kedua media massa tersebut adalah media massa nasional dengan oplah di atas 200.000 eksemplar per hari. Selain media massa berupa koran nasional juga digunakan sumber penelitian pendukung dari koran lokal, majalah dan situs berita *online*.

Sumber bahan penelitian di Malaysia juga merujuk pada koran nasional setempat yakni Utusan Malaysia dan Berita Harian. Kedua koran tersebut memiliki oplah yang besar dan telah terbit jauh sebelum peristiwa penelitian ini terjadi. Sebagai sumber pendukung, penulis juga menggunakan bahan sumber dari majalah dan situs berita *online* terbitan Malaysia.

III. Ruang Lingkup

Penulisan sejarah akan lebih mudah dan menjadi lebih terarah karena dilengkapi dengan rumusan masalah. Rumusan tersebut dalam bentuk temporal, spasial dan keilmuan. Ketiga rumusan itu penting diperhatikan, agar sejarawan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak relevan dari permasalahan yang sedang ditulis.¹² Penulis sengaja menggunakan tiga pola rumusan tersebut, demi menghindari hasil kajian mengambang atau tidak fokus. Berdasar hal demikian, ruang lingkup temporal, spasial dan keilmuan digunakan sebagai acuan penulisan karya sejarah ini.

¹² Taufik Abdullah, Abdurrahman Surjomihardjo. (ed), *Ilmu Sejarah dan Historiografi : Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. xii

III.I Lingkup Temporal

Setelah melewati serangkaian perundingan, dan gagal mencapai kata sepakat, maka sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan memasuki babak baru pada tahun 1998. Pada tahun tersebut, dua negara yang bertikai secara resmi membawa sengketa kepemilikan pulau ke Mahkamah Internasional. Penulis menjadikan 2 November 1998 sebagai batasan awal karena pada masa itu sengketa kepemilikan pulau mulai ditangani pihak ketiga, dengan sendirinya pemberitaan media massa makin meluas.

Perjalanan kasus di Mahkamah Internasional berlangsung cukup lama. Keputusan tentang status kepemilikan Pulau Sipadan - Ligitan baru ditentukan di Selasa, 17 Desember 2002 di negeri Belanda, Den Haag. Informasi tentang keputusan tersebut disiarkan oleh berbagai media massa. Dalam kurun waktu tahun 2002, topik tentang Sipadan – Ligitan seringkali menjadi tema sentral yang diterbitkan oleh media massa.

Pemberitaan media massa yang cenderung bersifat aktual, menjadikan topik yang diturunkan selalu berdekatan dengan waktu kejadiannya. Namun, media massa juga bisa menurunkan tema pemberitaan yang sama selama beberapa hari berturut-turut, jika nilai beritanya dianggap kuat dan mampu menjual di pasaran. Untuk itu penulis menjadikan tahun 2002 sebagai batasan akhir.

Selama kurun waktu satu tahun saat sengketa kepemilikan Pulau Sipadan – Ligitan diputuskan oleh Mahkamah Internasional, penulis anggap sebagai batasan waktu yang relevan untuk studi kasus tentang pemberitaan media massa. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, topik tentang Sipadan – Ligitan memang banyak diberitakan. Informasi yang diterbitkan tidak

hanya bersifat langsung dengan perkembangan tema Sipadan – Ligitan, tapi juga meliputi tema-tema lain yang kasusnya mirip dengan sengketa batas wilayah Sipadan – Ligitan tersebut.

III.II Lingkup Spasial

Secara khusus penelitian ini dilakukan berupa riset surat kabar yang ada di perpustakaan nasional. Perpustakaan memiliki koleksi bahan-bahan sumber berupa dokumen cetak yang salah satu jenisnya adalah surat kabar.¹³ Secara umum, untuk menyempurnakan penelitian maka penelusuran dokumen cetak surat kabar tidak hanya dilakukan di perpustakaan nasional di Jakarta (Indonesia), tapi juga dilakukan di perpustakaan nasional di Kuala Lumpur (Malaysia).

Selain studi kepustakaan, juga dilakukan penelitian di kantor arsip dan museum. Koleksi perpustakaan, arsip, dan museum dapat diketahui dari petunjuk-petunjuk, indeks, bibliografi, katalog, majalah, jurnal yang menginformasikan pada sejarawan tentang bahan dokumen apa saja yang tersedia.¹⁴

Dipilihnya kepustakaan sebagai lokasi utama penelitian, sesuai tema penelitian ini, “Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan, Studi Pemberitaan Media Massa”. Penelitian ini masih termasuk kajian historiografi, di mana nantinya lebih mengandalkan bahan sumber tertulis, yakni surat kabar.

¹³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Ombak : Yogyakarta, 2012), Hal 86.

¹⁴ *Ibid*, hal 94.

Beranjak dari indeks surat-surat kabar, dapat diketahui berbagai macam surat kabar dari dalam dan luar negeri; ada yang independen dan ada pula yang memiliki keberpihakan dengan menyuarakan golongan tertentu.¹⁵

IV. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber di kepustakaan. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata (*eyewitness*). Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Ilmu sejarah mengenal “metode kritik sumber” sebagai metode dasarnya.¹⁶

Sebagai upaya menghindari terjadinya kerancuan objek penelitian dan juga untuk memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan terhadap beberapa buah buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku pertama berjudul: *Citra Bung Karno (Analisis Berita Pers Orde Baru)* yang ditulis Agus Sudibyo. Buku ini mengulas tentang Bung Karno sebagai salah satu negarawan yang meskipun telah bertahun-tahun meninggal dunia, tetap mengundang ketertarikan kalangan pers untuk memberitakannya. Ketokohan Bung Karno dalam buku ini diibaratkan sebagai oase yang tak pernah kering dalam konteks produksi berita media massa.

Penelitian yang mendasari buku tersebut beranjak dari pendekatan analisis framing, yang terbagi dalam dua tahap, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Tahap pertama adalah analisis isi terhadap item – item berita yang dipilih sebagai sampel penelitian. Pada tahap ini

¹⁵ *Ibid*, hal 96.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 4

diimplementasikan prinsip-prinsip konvensional untuk mengumpulkan dan mengolah data tekstual berita media massa. Tahap kedua, buku ini memilih beberapa item berita dari seluruh sampel penelitian yang dianggap mempresentasikan kecenderungan yang dominan dalam wacana tentang Bung Karno.

Buku kedua, berjudul Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi. Buku yang ditulis Henry Subiakto dan Rachmah Ida ini memberikan ulasan tentang praktik-praktik kegiatan yang dikategorikan sebagai komunikasi politik termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan media.

Selanjutnya terdapat tesis berjudul : *Upaya Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan (Tinjauan Aspek Ketahanan Nasional)* yang ditulis oleh, Hasun, mahasiswa program pascasarjana program studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia tahun 1998. Tesis ini menjelaskan tentang keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan dari aspek pertahanan dan keamanan nasional. Pulau yang berada di daerah perbatasan sebagai tolak ukur batas wilayah sekaligus gugus depan dalam upaya membela kedaulatan. Selain mengulas tentang aspek ketahanan, tesis ini juga memuat sejarah kepemilikan pulau dan sengketa – sengketa daerah perbatasan yang kondisi persoalannya mirip dengan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Tesis lainnya yang menjadi tinjauan berjudul : *Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia Terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan Melalui International Court Of Justice (ICJ)*. Tesis ini ditulis Ratnaningrum dari program pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Kajian yang dilakukan dalam tesis ini meliputi sistem peradilan hukum internasional, tahapan proses hukum, lembaga, dan putusan – putusan hukum

internasional yang berkaitan dengan sengketa wilayah. Selain itu tesis ini juga memuat aspek sejarah tentang Pulau Sipadan dan Ligitan.

Selanjutnya buku berjudul: *Generasi Baru Wartawan & Industri Pers Indonesia*. Buku ini mengambil perbandingan antara pers daerah dan pers nasional. Juga dijelaskan tentang usaha industri media dengan ancaman hukuman dari pemerintah, atas pemberitaan yang telah diturunkan. Buku ini menjadi masukan dalam penulisan tesis karena dianggap relevan untuk memposisikan peranan pers sesuai tema yang dibuat.¹⁷

Sumber lain yang menulis tentang media masa adalah tulisan dari Dedy N. Hidayat dkk., dalam buku berjudul “Pers Dalam Revolusi Mei-Runtuhnya Sebuah Hegemoni”. Dalam buku ini dijelaskan perubahan “indutri pers” secara lebih holistik, dengan menempatkan pers sebagai institusi kapitalis yang penuh kontradiksi internal dalam suatu jalinan perubahan pada jenjang mikro (teks isi media), meso (dinamika proses-proses memproduksi dan mengkonsumsi teks media), dan makro (dinamika struktur sosial dan budaya dalam konteks kesejarahan yang spesifik).¹⁸

Untuk melengkapi rujukan, penulis juga membaca karya berjudul *Historiografi Perkotaan Pada Masa Kolonial* yang ditulis dosen Ilmu Sejarah Dr Purnawan Basundoro.¹⁹ Satu hal yang dibahas dalam karya ini adalah tulisan pendek tentang Yogyakarta yang ditulis oleh H.H. van Kol dimuat dalam *Indische Gids* edisi tahun 1904 dengan judul *De Residentie Djokjakarta*.²⁰

V. Kerangka Analisis

¹⁷ Suwidi Tono, *Generasi Baru Wartawan & Industri Pers Indonesia*, (Depok : Vision03, 2003).

¹⁸ Dedy Hidayat, *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000).

¹⁹ Purnawan Basundoro adalah dosen Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.

²⁰ Artikel berjudul *:Historiografi Perkotaan Indonesia Pada Masa Kolonial* karya Purnawan Basundoro, dimuat di halaman situs : <http://basundoro-fib.web.unair.ac.id>.

Penelitian ini membahas tentang pemberitaan media massa yang berkaitan dengan Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan selama kurun waktu tahun 1998 - 2002. Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber dokumen, sebagai syarat dalam penelitian sejarah.²¹ Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam artian sempit. Sementara dokumen dalam artian luas juga meliputi monumen, *artifact*, foto, *tape* dan lainnya.²² Dalam hal ini penelitian akan menfokuskan penggunaan bahan sumber dari dokumen-dokumen surat kabar (media massa). Surat kabar merupakan bahan dokumen yang sangat berharga. Ruang lingkupnya sangat luas dan meliputi soal-soal dari yang lokal, nasional, sampai internasional.²³

Adapun surat kabar yang dijadikan bahan sumber yakni surat kabar nasional dan surat kabar lokal. Untuk surat kabar nasional, penulis mengambil rujukan pada Harian Kompas, Majalah Tempo, Harian Media Indonesia. Surat kabar lokal tersebut terbit di Indonesia. Sementara untuk data pembanding, juga diambil bahan sumber dari surat kabar yang terbit di Malaysia. Di antaranya Utusan Malaysia, Berita Harian, dan New Strait Times.. Selain merujuk pada bahan sumber surat kabar, penelitian juga mengambil bahan sumber dari majalah. Ini dilakukan untuk memperdalam materi penelitian, karena terkadang surat kabar memiliki kelemahan dengan minimnya data dan kurangnya akurasi sumber, dengan alasan dikejar waktu penerbitan yang bersifat harian.

Koran yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah koran nasional atau koran arus utama, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Koran arus utama salah satunya bisa ditentukan dari oplah cetak yang paling besar atau koran yang telah lama berdiri dibandingkan media massa lainnya. Hal ini bisa diketahui dengan melihat *profile company* (keterangan perusahaan) atau

²¹ Sartono Kartodirjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumen*, dalam Koentjaraningrat (Metode-metode Penelitian Masyarakat), (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991). Hal. 45.

²² *Ibid*, hal. 46.

²³ *Ibid*, hal 54.

melihat *box* (kotak) redaksi dari media bersangkutan. Selain koran berskala nasional, sumber tambahan tetap dibutuhkan dengan memperhatikan pemberitaan yang disajikan koran lokal maupun majalah dan situs berita *online*.

Untuk menjamin adanya keseimbangan antara yang pro dan kontra dalam pemberitaan surat kabar, maka penelitian ini memperhatikan sejumlah aspek. Yakni identifikasi “warna” dalam hal interpretasi peristiwa, norma-norma ketelitian, sumber informasi, dan identifikasi kepribadian pengarang atau wartawan yang menuliskan berita tersebut.²⁴

Pengertian media massa itu sendiri ada dua macam, yaitu media massa dan media nirmassa. Menurut Totok Djuroto, media artinya alat komunikasi, sedangkan massa kependekan dari kata masyarakat (orang banyak).²⁵ Media massa berarti alat komunikasi yang boleh dimanfaatkan untuk semua orang. Sedangkan media nirmassa adalah alat komunikasi yang tidak boleh digunakan untuk semua orang, oleh karena itu alat komunikasi tersebut bersifat individu. Misalnya, telepon, surat dan lainnya yang bersifat individu. Orang lain tentu tidak akan diperkenankan melihat atau mendengarkan saat telepon atau surat itu kita gunakan. Terutama bila menyangkut hal yang bersifat pribadi.

Media massa cetak adalah alat komunikasi untuk masyarakat yang dibuat dengan percetakan atau mencetaknya terlebih dahulu. Ada berbagai bentuk media massa cetak yaitu surat kabar, majalah, tabloid, bulletin dan buku.²⁶

Semakin terbuka sistem politik suatu Negara maka semakin besar pengaruh media massa terhadap kehidupan politik Negara tersebut. Salah satu ciri dari sistem politik yang terbuka

²⁴ *Ibid*, hal 56.

²⁵ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*. (Bandung :Remaja Rosda Karya, 2004).

²⁶ *Ibid*, hal. 12

adalah berfungsinya pendapat umum dalam mekanisme pengambilan keputusan publik dan pendapat umum sendiri dibentuk terutama oleh media massa. Bahkan media massa dapat dikatakan sebagai “pilar keempat” pemerintahan demokratis, sejajar dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Melalui pendapat umum yang menginternasional pula media massa mempunyai peluang untuk menggiring sesuatu menjadi isu internasional atau tidaknya. Meskipun suatu persoalan pada awalnya hanya menjadi isu domestic dan dikelola sebatas domestik, akan berubah menjadi masalah internasional ketika media massa mengeksposnya sehingga menjadi perhatian dunia.²⁷

Sementara sengketa dalam pengertian umum disebutkan sebagai implikasi dari perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.²⁸ Dalam setiap sengketa salah satu pihak mungkin berada di pihak yang benar, atau satu pihak mungkin secara moral benar dan pihak lainnya secara hukum benar. Dalam hal ini sengketa kepemilikan Pulau Sipadan – Ligitan masuk ranah hukum perdata, berdasar pengertian, setiap perkara perdata dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan, dengan asumsi ada hak-hak yang telah dilanggar.²⁹

Penelitian yang bersumber dari surat kabar, menjadi bagian dari kajian sejarah historiografi. Kajian ini melihat pada sejarah yang sudah tertuliskan, dalam artian ada unsur subjektivitas dalam karya tersebut. Penulisan hasil kajian historiografi tidak boleh terjebak dalam unsur subjektivitas tersebut. Untuk memandunya diperlukan landasan teori analisis kritis.

²⁷ Kiki Zakiah, *Pencitraan Indonesia di Media Massa Malaysia*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No.1, April 2012. Universitas Islam Bandung.

²⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²⁹ *Ibid*, hal. 322

Sehingga hasil dari objek penelitian ditempatkan secara tepat apa adanya. Tidak menilai salah satunya benar atau salah.

Dalam mengulas pemberitaan media massa, maka penulis menggunakan Metode Analisis kritis Komunikasi Interpretasi Wacana (MAKIWA). Metode ini digunakan untuk memahami transaksi bahasa tulisan, lisan, semiotik dan tanda-tanda lain dalam suatu ruanglingkup, demi mendapat kedalaman makna secara jelas. MAKIWA adalah hasil penterjemahan terhadap istilah dari bahasa Inggris yang bernama *Critical Discourse Analysis* (CDA).³⁰

Paradigma kritis tentang media dan berita bersumber pada bagaimana berita tersebut diproduksi dan bagaimana kedudukan wartawan dan media bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi berita. Sebagian mempercayai bahwa wartawan dan media adalah entitas yang otonom, dan berita yang dihasilkan haruslah menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.³¹

Definisi wacana menurut JS Badudu ada dua pengertian. Pertama, wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Kedua, wacana adalah kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan, mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan lisan maupun tertulis (Badudu 2000).³²

Wacana dalam pemahaman Fairclough mempunyai tiga efek. Pertama, wacana memberikan andil dalam mengkonstruksikan identitas sosial dan posisi subjek. Kedua, wacana

³⁰ Munawar Syamsuddin, *Makiwa (Metode Analisis Kritis Komunikasi Interpretasi Wacana)*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), Hal 6

³¹ *Ibid.* hal 27

³² *Ibid.*

membantu mengkonstruksikan relasi sosial di antara orang-orang. Ketiga, wacana berkontribusi mengkonstruksikan sistem pengetahuan dan kepercayaan. Ketiga efek tersebut secara bersama-sama memberikan sumbangan dalam transformasi masyarakat.³³

Dalam menggali informasi yang lebih dalam maka dilakukan studi analisis isi atau konten dari pemberitaan media massa. Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kecenderungan pesan-pesan yang disampaikan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Analisis isi dapat digunakan untuk meneliti komunikasi apa pun, seperti pidato, dokumen tertulis, foto, surat kabar, dan acara televisi. Metode ini digunakan secara luas untuk meneliti aspek pesan komunikasi. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui kecenderungan politik suatu media massa, kemampuan melontarkan isu-isu politik, independen tidaknya suatu media, atau kemana media itu berpihak, semua itu dapat diketahui dengan melakukan analisis isi pemberitannya dalam kurun waktu tertentu.³⁴

Di Indonesia ketika SIUPP³⁵ dibebaskan, pertumbuhan surat kabar pun melonjak signifikan. Surat kabar harian pada 1997 hanya ada sekitar 79 perusahaan. Pada tahun 1999 meningkat menjadi 299 perusahaan. Sementara tabloid dari 88 perusahaan menjadi 886 perusahaan. Majalah dari 144 menjadi 491 perusahaan. Buletin dari 8 menjadi 11 perusahaan. Total ada penambahan 1.398 SIUPP baru (sumber SPS Pusat). Ini belum termasuk media cetak

³³ *Ibid.*

³⁴ Henry Subiakto & Rachman Ida, “*Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hal 8.

³⁵ Salah satu warisan Presiden BJ Habibie di bidang informasi adalah kebebasan pers. Dasar hukumnya adalah pencabutan ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang termaktub dalam Permenpen Nomor 1 Tahun 1984 oleh Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Seperti dikutip dari “BJ Habibie: Kisah Hidup dan Kariernya”, pencabutan beleid itu diikuti dengan penetapan aturan baru dalam bentuk Permenpen Nomor 1 Tahun 1998. Dengan ketetapan baru tersebut, majalah dan tabloid yang pernah dibredel bisa mengajukan SIUPP kembali. Sampai dengan Juni 1999, tak kurang dari 400 SIUPP dikeluarkan pemerintah. Pers bebas bersuara apa saja. Kebebasan pers ini merupakan kebijakan yang paling dramatis, yang telah membuat kehidupan pers di Indonesia mungkin yang paling bebas di seluruh dunia. (lihat <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/26/o9c8da-warisan-habibie-kebebasan-pers-yang-membebasakan.>)

yang terbit tanpa SIUPP. Namun penambahan jumlah perusahaan itu tidak diimbangi oleh jumlah tiras. Surat kabar harian misalnya, kendati jumlah mediana bertambah tirasnya justru turun. Pada tahun 1997 mempunyai total tiras lima juta eksemplar. Pada tahun 1999 malah turun menjadi 4,7 juta eksemplar. Majalah juga mengalami penurunan dari total tiras 4,3 juta, turun menjadi 4,1 juta. Hanya tabloid yang mengalami kenaikan tiras, yaitu dari 5,5 juta menjadi 7,7 juta.³⁶

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih dan bijaksana. Logikanya, melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa termasuk kinerja pemerintah., sehingga muncul mekanisme *check and balance*, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Media massa kemudian disebut juga sebagai *the four estate of democracy*, pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui penyampaian berita dan opini, dengan sendirinya media melakukan fungsi kontrol dan kritik terhadap pilar kekuasaan yang lain. Fungsi kontrol dan kritik ini merupakan karakteristik utama institusi media, sekaligus karakteristik kerja profesi wartawan.

Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut *civic empowerment*. Banyak jurnalis tidak ragu-ragu merasa bahwa secara ideal profesi mereka adalah memberikan informasi agar warga negara mampu memainkan peran demokratiknya secara signifikan.

³⁶ *Ibid.* hal. 107

Sejak reformasi bergulir 1998 lalu, pers telah mengalami suatu tahapan metamorphosis yang luar biasa. Instityusi ini telah menemukan wahana kebebasan, terutama setelah diluncurkannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pers, dan dihapuskannya persyaratan SIUPP. Sejak itu media massa Indonesia baik cetak maupun elektronik, secara kualitatif mengalami suatu kebebasan. Secara umum pers tidak lagi takut mengungkap berbagai fakta sosial, baik yang positif maupun negatif.³⁷

Ketika mengungkap realitas social yang buruk, tentang konflik misalnya, bukan berarti pers senang atau setuju dengan realitas itu. Persoalannya, bukan senang tidak senang, atau setuju tidak setuju. Tetapi karena realitas itu ada, maka pers pun memberitakannya. Jadi, baik buruknya isi pers bukan masalah per situ sendiri, melainkan karena problem realitas. Kalau akan memperbaiki, yang harus diperbaiki realitasnya. Bukan pers atau cerminnya.

Kelompok lain yang mengkhawatirkan ekses kebebasan pers, melihat apa yang terjadi dewasa ini adalah fenomena kebablasan. Pers dianggap tidak mau tahu dengan kondisi negara yang sudah carut marut. Pers seakan tetap asik dengan peran kebebasannya, yakni mengungkap berbagai fakta berdasar pertimbangan mereka sendiri. Kondisi bangsa yang sedang terpuruk, sementara masyarakat sudah lama menderita. Akhirnya pemberitaan berbagai konflik yang muncul dinilai mendatangkan kejenuhan. Tatkala bangsa dan Negara sedang kritis, media dinilai memetik keuntungan dari pemberitaannya. Seakan membenarkan asumsi : *“mass media thrive on crisis, but threatened by normalcy”*.³⁸

VI. Metode Penelitian

³⁷ *Ibid.* hal 115.

³⁸ *Ibid.* hal 116.

Untuk melakukan penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri yakni metode sejarah. Metode sejarah sifatnya terbuka dan hanya tunduk pada fakta yang ada, sehingga mengharuskan orang agar hati-hati. Metode sejarah adalah suatu proses untuk menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa lalu guna memperoleh aktifitas manusia tersebut pada masa lampau.³⁹ Dalam metode sejarah, dikenal ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Heuristik yaitu proses pengumpulan data, berupa dokumen surat kabar sebagai sumber sejarah. Pada tahap ini, sumber diperoleh melalui perpustakaan nasional Indonesia di Jakarta, perpustakaan kampus Universitas Andalas Padang, perpustakaan daerah Pemprov Sumbar. Sementara di Malaysia, bahan sumber dari surat kabar didapatkan dari perpustakaan Universiti Malaya, dan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Perpustakaan Negara Malaysia yang semuanya berada di Kota Kuala Lumpur.

Riset kepustakaan ini penting karena dengan melalui penelusuran dan penelaahan kepustakaan dapat dipelajari cara menggunakan teori untuk landasan pemikiran. Selanjutnya, kritik sumber merupakan proses pengujian terhadap kredibilitas atau keabsahan atau ontentisitas bahan sumber. Kritik sumber dibagi dua. Pertama, kritik ekstern yang dilakukan untuk mengetahui ontentisitas sumber. Dalam tahapan ini, sumber-sumber yang telah didapat, diuji dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat dipastikan keabsahannya. Kedua, kritik intern untuk mengetahui kredibilitas atau kebenaran isi sumber tersebut.

Kemudian interpretasi yang merupakan tahapan ketiga. Pada tahapan ini, fakta-fakta sejarah ditafsirkan dan dianalisis serta dihubungkan dengan rangkaian kronologis, sehingga

³⁹ Lois Gottchalk, *Mengerti Sejarah*. (Terj. Nugroho Notosusanto). (Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1998), hal. 32

didapatkan alur yang sistematis. Terakhir adalah tahapan historiografi. Dalam tahapan ini, fakta yang terkumpul tersebut kemudian disintesakan dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang deskriptif-analitis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami pembaca. Hasilnya adalah berbentuk tulisan sejarah yang bersifat ilmiah deskriptif analitis.

VII. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini (direncanakan) terdiri dari lima bab. Setiap bagian menitikberatkan pada permasalahan tertentu dan di antara bab-bab memiliki keterkaitan hubungan.

Bab I yang merupakan bab pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis dan Pendekatan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan deskripsi umum tentang latar geografis, demografis, kultural dan sosiologis dari wilayah objek penelitian yakni pulau Sipadan-Ligitan tahun 2002 yang dikomparasikan dengan deskripsi masyarakat pada masa sekarang.

Bab III menjelaskan, tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memenangkan sengketa kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan. Pada bab ini juga dipaparkan sumber-sumber primer yang menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Upaya yang dilakukan pemerintah akan merinci kelompok-kelompok delegasi, latar belakang pendidikan dan poin-poin pembahasan setiap pertemuan dilakukan.

Bab IV membahas tentang propaganda media massa terkait sengketa perbatasan negara. Pada bab ini akan dijelaskan sikap media terhadap kebijakan pemerintah di negaranya masing-masing. Dalam hal ini rujukan diambil dari media yang terbit di Kuala Lumpur Malaysia dan media yang terbit di Jakarta Indonesia. Dampak politik dari kebijakan itu juga dibahas dan tanggapan publik selama dan sesudah sengketa itu.

Terakhir, bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam tesis ini.

